

Abstract

This paper discusses the new regulation of Indonesian mining and minerals and the implementation of the Indonesia-Japan Partnership Agreement (IJEPA). Mineral and coal mining is a non-renewable natural resource, so for the sake of sustainability the government's role in management, supervision and supervision is needed. Many Pros and Cons have been enacted since Law No.4 of 2009 concerning the ban on the export of raw minerba. This writing is a Library Studies (Library Research). Namely the technique of collecting data based on the search of existing issues. The results of this paper conclude (i) the government issued Law No.4 of 2009; (ii) the demands and support of the Indonesian community on minerals mining; (iii) Impact of Law No.4 of 2009 on the implementation of IJEPA.

Keywords: Mineral and coal mining, Law No.4 of 2009 on minerba.

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai regulasi baru pertambangan dan minerba indonesia dan pelaksanaan Indonesia- Japan Partnership Agreement (IJEPA). Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga demi keberlangsungan diperlukan peran pemerintah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Banyak Pro dan Kontra sejak diberlakukan Undang- Undang No.4 Tahun 2009 tentang pelarangan ekspor minerba mentah. Penulisan ini merupakan Studi Kepustakaan (Library Research). Yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan penelusuran isu yang ada. Hasil tulisan ini menyimpulkan (i) pemerintah mengeluarkan UU No.4 Tahun 2009; (ii) tuntutan dan dukungan masyarakat indonesia tentang pertambangan minerba; (iii) Dampak UU No.4 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan IJEPA.

Kata Kunci: Pertambangan mineral dan batubara, undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang minerba.